BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan jaman. Bahkan pada abad ini, penggunaan teknologi semakin meluas di seluruh dunia dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web atau yang akrab disebut dengan internet. Kehadiran teknologi internet di tengah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan akan informasi dengan sangat cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, hal-hal yang dahulu dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama, kini dengan bantuan teknologi internet dan sistem komputerisasi yang canggih menjadikan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sistem on-line atau daringpun (dalam jaringan) semakin populer, termasuk di Indonesia.

Electronic Government (*e-goverment*) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk reformasi birokrasi dan mendukung dengan sebaik-baiknya sebagaimana di atur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yaitu mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dewasa ini kemajuan teknologi informasi memasuki fase perkembangan yang sangat pesat, berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk dalam hal birokrasi (pemerintahan). Pelayanan pemerintah kepada publik harusnya dapat disederhanakan dengan menggunakan apliaksi-aplikasi, berbasis teknologi informasi agar sistem menejemen pemerintah yang dikenal selama ini sebgai sistem hierarki kewenangan dan komando sektoral dapat ditiadakanTarget pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2019 sebesar 9 persen, dinilai akan hadapi banyak tantangan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan Indonesia di kisaran 9,82 persen pada Maret 2018, yang diklaim oleh Sri Mulyani sebagai angka terendah dalam sejarah Indonesia.(Agus Dwiyanto, 2006)

E-government awalnya diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa.Pada mulanya *E-government* bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan layanan publik. *E-government* sudah diterapkan di banyak negara di berbagai belahan dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Implementasi *E-government* juga terjadi di sejumlah kota dan daerah di Indonesia, (nap.edu, diakses 06 November 2019)

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, hampir seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan. Kota Surabaya menjadi salah satu Kota di Indonesia yang telah memenangkan predikat Smart City yang diperoleh pada ajang Smart City Award 2011 yang diadakan oleh majalah Warta Ekonomi. Smart City Awards dari majalah Warta Ekonomi ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada kota yang sukses membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan public, (Surabaya.go.id, diakses 06 November 2019)

Di Indonesia, inovasi *E-government* sudah diinisiasi sejak beberapa tahun belakangan ini. Selain adanya kebutuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sebuah sistem yang terintegrasi, pengembangan *E-government* di Indonesia didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* dan didukung pula oleh regulasi yang terkait seperti Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (Vita Elysia, Ake Wihadanto, Sumartono,2019)

UUU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 tentang ASN bahwa sebagai perencana, pelaksana, pengawasan penyelenggara tugas ilmu pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan public yang profesioanal, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti kutipan ayat Alquran: “Jadilah kalian sebaik-baik manusia.” (QS. Ali Imran: 110). Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda: “Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga.” (HR. Tirmidzi). Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Swt: “Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.” (QS. Al-Isra’: 7)

Pemerintah Provinsi Gorontalo mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Melalui Visi provinsi inovatif, Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang melaksanakan proses transformasi menuju *E-government* yang menuntut adanya perubahan-perubahan yang inovatif. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan satuan kerja lingkup Pemerintah Provinsi gorontalo bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan. (Pemprov Gorontalo, 2008)

Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 melalui Dinas Kominfo tengah melakukan evaluasi terhadap optimalnya penerapan SPBE yang telah diterapkan. Hasil verifikasi dan validasi di Tempat pada pelaksanaan evaluasi disebut bakal menjadi data indicator tingkat kematangan SPBE Kabupaten Gorontalo. Dalam evaluasi yang tengah dilakukan Dinas Kominfo, ia menyebut, beberapa tingkat kematangan pada kapabilitas proses yang dinilai ditingkat organisasi perangkat daerah (OPD) meliputi, perintisan, pengelolaan, standarisasi, integrasi dan pengukuran, serta optimalisasinya. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas dan fungsi teknis dinilai dari informasi layanan, interaksi, transaksi pertukaran informasi dan layanan, kolaborasi, serta optimalisasi layanan SPBE yang beradaptasi terhadap

perubahan lingkungan internal mapun ekternal. (JohniMile/Kominfo Kab_Gto, diakses 06 November 2019)

Observasi awal yang dilakukan di Kantor Camat Tibawa, Bahwa"*E-government* memang sudah diterapkan di Kantor Camat Tibawa, namun belum adanya SDM yang ahli dalam mengoprasikan Aplikasi *E-government* dan untuk tenaga komputer yang melayani pengurusan surat menyurat seluruhnya dikerjakan oleh tenaga kontrak/honor sehingga pelaksanaan pelayanan terkesan lambat dan kurang efektif"

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana "Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengindentifikasi masalah dalam penilitian ini yakni:

1. Penerapan Aplikasi *E-government* belum bekerja dengan baik.
2. Belum tersedianya SDM yang memadai dalam penerapan *e-government.*
3. Peran aparatur dalam penyelenggaraan tugas belum maksimal.
4. Masih terdapat hambatan/kendala dalam penerapan *e-government.*

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan berbagai uraian didalam latar belakang, maka persoalan yang akan di teliti adalah:''Bagaimana Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo".

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo.

1.5 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaaat Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan iniyaitu dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah yang ada di kantor camat tibawa dalam melakukan pengembangan *E-Goverrntment* dalam rangka meningkatkan pelayanan *public*, dan transparansi serta akuntabilitas dalam system pemerintahan.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pengembangan *E-government.*